

## **ELECTRONIC GOVERNMENT: IMPLEMENTASI PEMASANGAN ALAT REKAM TRANSAKSI ONLINE PAJAK HOTEL**

**Nanang Suparman<sup>1)</sup>**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1)</sup>*

*Email. Nnanag.suparman@uinsgd.ac.id<sup>1)</sup>*

### **Abstract**

*PAD is one of the sources of financing for a region which has a very important role in helping provide income in carrying out the functions of local government. One important component of the composition of PAD is the local tax sektor. Local taxes are carried out by local governments and allocated to finance routine expenditures and development in the region. Hotel tax is a significant contributor to regional tax revenues each year. One of the programs used to increase regional income from hotel taxes is using an online transaction recorder installed in every hotel. This study aims to determine the extent to which the influence of the existence of an online transaction data recording device program on hotel taxes in Bandung Regency on local revenue receipts in the form of taxes. The research method used is descriptive qualitative method with a case study approach. In collecting data, researchers used primary and secondary data. The results show that the implementation of the program can be said to be optimal based on the achievement of predetermined hotel tax revenue targets. However, there are still obstacles such as changes in the mechanism for using the tool and the lack of awareness of taxpayers in making payments and using the tool. So that with this, not all potential revenues in the hotel tax sektor have been maximally utilized.*

**Keywords :** *Policy Implementation, Local Taxes, Transaction Recording Tools*

### **Abstrak**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pembiayaan bagi suatu wilayah yang memiliki peran penting dalam membantu menyediakan pendapatan dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah. Salah satu komponen penting dalam komposisi PAD adalah sektor pajak daerah. Pajak daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan di wilayah tersebut. Pajak hotel merupakan penyumbang penting terhadap pendapatan pajak daerah setiap tahunnya. Salah satu program yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pajak hotel adalah dengan menggunakan alat pencatat transaksi online yang dipasang di setiap hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana pengaruh dari keberadaan program alat pencatatan data transaksi online terhadap pajak hotel di Kabupaten Bandung terhadap penerimaan pendapatan daerah dalam bentuk pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini dapat dikatakan optimal berdasarkan pencapaian target pendapatan pajak hotel yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, masih ada hambatan seperti perubahan dalam mekanisme penggunaan alat dan kurangnya kesadaran dari para wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan menggunakan alat tersebut. Sehingga dengan ini, belum semua potensi pendapatan di sektor pajak hotel telah dimanfaatkan secara maksimal.

**Kata Kunci :** *Implementasi Kebijakan, Pajak Daerah, Alat Pencatatan Transaksi*

## A. PENDAHULUAN

Dalam jalannya pemerintahan, tentunya suatu Negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit, agar terlaksananya fungsi dan tugas dari Negara. Berkenaan dengan biaya dalam rangka jalannya pemerintahan di Indonesia telah dikelola dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Pengelolaan uang atau dana Negara ini memakai anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja, serta pembiayaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan termasuk juga pendapatan lain-lain yang sah. APBD sendiri terdiri atas 3 unsur, yaitu pendapatan, belanja dan juga pembiayaan. Dalam bentuk yang baru APBD pun pendapatan pun dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah diperoleh dari pendapatan retribusi daerah, pajak daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah dan juga pendapatan asli daerah hukum lainnya. Pemungutan pendapatan asli daerah dilaksanakan berdasarkan perda sesuai dengan undang-undang. Salah satu komponen penting dari susunan PAD adalah sektor pajak daerah. Pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan biasa di wilayah tersebut.

Pada pajak daerah terdapat beberapa sektor yang menjadi penyumbang dana yang cukup besar salah satunya yaitu pajak hotel. Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sejak tahun 2019-2021 pajak hotel menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Karena berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa pada dari tahun 2019-2021 pajak hotel berhasil mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut data penerimaan sektor pajak hotel pada tahun 2019-2021:

Tahun	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi
2019	Pajak Hotel	4.610.000.000	7.568.662.689
2020	Pajak Hotel	4.547.937.000	6.471.163.124
2021	Pajak Hotel	8.000.000.000	10.384.881.008

**Tabel 1.** Data Penerimaan Pajak pada Sektor Hotel Tahun 2019-2021

Sumber: Dokumen Bapenda Kab. Bandung, (Diolah Peneliti, 2023)

Tabel diatas menjelaskan mengenai target dan realisasi anggaran yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam rentang waktu 2019-2021. Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa setiap tahunnya BAPENDA pada sektor pajak hotel berhasil mengumpulkan pendapatan dan mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Meskipun pada awal tahun 2020, dunia terhenti ketika pemerintah di seluruh dunia memutuskan untuk memasuki keadaan darurat atau bencana karena merebaknya pandemic covid-19. Dalam menangani hal tersebut pemerintah melakukan pembatasan pergerakan yang ketat dan sarana kebersihan untuk mencegah interaksi secara langsung atau tatap muka. Akibatnya dari adanya hal tersebut, banyak aktivitas termasuk sekolah, bekerja, berbelanja dan jual pelaksanaan pelayanan pemerintahan dipindahkan secara online, yang secara drastic meningkatkan paparan terhadap ancaman dan resiko dari dunia maya pula karena seluruh kegiatan dianjurkan untuk dilaksanakan secara online. Bahkan sampai ada perintah untuk larangan perjalanan, pelacakan orang dan pelacakan kontak, jam malam dan kampanye menggunakan masker wajah, saran kebersihan dan kegiatan sosial budaya secara online (WHO, 2021).

Langkah- langkah ini berarti bahwa program pendidikan dan semua interaksi sosial dan ekonomi lainnya, akan dihentikan atau dilakukan melalui internet (Pandey & Pal, 2020). Bahkan dibanyak Negara, banyak orang yang kehilangan kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarga mereka dan mulai bereksperimen dengan TIK (Teknologi informasi dan komunikasi). (Candela et al., 2020; Crayne, 2020). Salah satu eksperimen yang dilakukan adalah dengan adanya Saint, Teknologi, Teknik dan Matematika (STEM). STEM adalah sektor dan disiplin ilmu yang penting bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi dan dapat membentuk masa depan masyarakat. Mereka juga menghasilkan peneliti, pemikir dan teknisi yang penting untuk kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, transportasi, energy, infrastruktur dan sektor lainnya. (EarthScience-WesternAustralia, 2019; Hammond et al., 2020).

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah memerlukan penyesuaian pula terhadap perubahan yang terjadi karena adanya pandemic pada tahun 2020 karena dilakukannya pembatasan kegiatan seluruh sektor kehidupan, maka dari itu salah satu program yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Bandung dalam melakukan pemungutan pada pajak hotel yaitu dengan menerapkan program pemasangan alat rekam transaksi online agar pendapatan terhadap pemerintah daerah dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pemasangan alat tersebut sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAPENDA terhadap wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga penerimaan yang didapatkan oleh BAPENDA dapat berjalan secara maksimal dan juga transparan. Transparansi diperlukan dalam pemerintah karena korupsi telah menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan di Negara-negara berkembang (Delavallade, 2006). Korupsi pemerintah, digambarkan sebagai pelanggaran aturan oleh orang-orang public demi keuntungan financial atau politik pribadi, merusak legitimasi pemerintah Negara dan melemahkan tatanan sosial masyarakat (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Hal ini juga dapat menghambat tata kelola pemerintahan yang baik (Gans-Morse et al., 2018). Bahkan dalam beberapa literatur mengatakan bahwa akses warga terhadap informasi dan transparansi pemerintah merupakan penghambat korupsi pemerintah.

Hood (2006) mendefinisikan transparansi sebagai hak dan kemampuan warga negara (dan organisasi, jika relevan) untuk mengakses informasi pemerintah dan informasi tentang pemerintah. Transparansi dalam pemerintahan dan publik umumnya dianggap diinginkan, sesuatu yang harus dipupuk dan dimungkinkan (Asamoah, 2019). Ide ini mendapatkan momentum yang cukup besar dengan munculnya komputasi dan internet yang telah memfasilitasi penerapan TIK ke fungsi dan prosedur pemerintah dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi warga negara (OAS, 2020). Namun, e-transparansi perlu didukung oleh langkah-langkah untuk meningkatkan e-interaktivitas karena strategi e-transparansi satu arah mungkin tidak cukup (Welch & Hinnant, 2003).

Sebelum menggunakan alat tersebut masih terdapat beberapa hotel yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan juga melakukan manipulasi data. Alat rekam transaksi online ini dipasang oleh BAPENDA sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Sampai saat ini (2021) BAPENDA berhasil melakukan pemasangan alat rekam transaksi online pada enam belas (16) hotel yang terletak di Kabupaten Bandung karena belum semua hotel bersedia untuk menggunakan alat tersebut dikarenakan keterbatasan.

Berikut data rekaman transaksi online wajib pajak sektor hotel di Kabupaten Bandung tahun 2021:

No	Wajib Pajak	Jenis	SubTotal	Discount	Service	Pajak	GrandTotal
1	Saung Gawir Bungalow	Hotel	100.068.028,00	-	-	10.006.972,00	110.075.000,00
2	Hotel Clove Garden	Hotel	9.265.679.771,00	-	926.567.975,00	1.019.224.779,00	11.211.472.533,00
3	Hotel Glamping	Hotel	1.123.481.821,00	-	-	112.348.181,00	1.235.830.002,00
4	Dago Highland	Hotel	1.928.147.902,00	-	192.814.796,00	212.096.269,00	2.333.058.966,00
5	Hotel Intercontinental	Hotel	30.489.737.170,00	-	3.048.973.717,00	3.353.871.089,00	33.843.608.259,00
6	Sutan Raja Hotel	Hotel	18.345.116.858,00	-	1.813.380.116,00	2.015.849.694,00	22.174.346.630,00
7	Dago Heuvel Hotel	Hotel	45.850.000,00	17.905.000,00	1.397.250,00	2.794.500,00	31.579.000,00
8	Hotel Scarlet	Hotel					
9	Hotel Antik	Hotel	6.190.000,00	25.000,00	-	616.500,00	6.778.000,00
10	Sindang Reret Hotel	Hotel	41.954.521,00	9.273.212,00	-	4.195.434,00	35.761.979,00
11	Ciwidey Valley Resort HOTEL	Hotel	1.533.110.080,00	-	-	153.311.553,00	1.686.421.633,00
12	Driam Riverside Hotel	Hotel	2.058.216.886,00	-	224.875.025,00	205.821.707,00	2.488.913.618,00
13	Lotus Garden	Hotel	74.967.423,00	-	15.000,00	7.496.667,00	82.485.915,00
14	Hotel Millenia	Hotel	150.364.580,00	-	-	15.036.255,00	165.400.552,00
15	Hotel Marbella	Hotel	1.240.588.615,00	-	124.058.655,00	136.464.890,00	1.501.112.159,00
16	Creative Restart Hotel	Hotel					
Total			66.403.473.655,00	27.203.212,00	6.332.082.534,00	7.249.134.490,00	76.906.844.246,00

**Gambar 1.** Data Transaksi Pajak Online Tahun 2021

Sumber: Dokumen Bapenda Kab. Bandung, (Diolah Peneliti, 2023)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pajak hotel berhasil menyumbang sebesar tujuh puluh enam miliar pada tahun 2021 dari keseluruhan pendapatan pajak daerah sebesar lima ratus enam puluh dua miliar atau sebesar 13,5% dari jumlah pemasukan yang disumbangkan sektor pajak daerah.

Maka berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk membahas mengenai Implementasi pemasangan alat perekam transaksi online pajak hotel.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi dari implementasi program pemasangan alat perekam data transaksi online, mengetahui sumberdaya yang menghambat dalam implementasi program pemasangan alat perekam data transaksi online, mengetahui disposisi yang ditempuh guna mengatasi kendala dalam implementasi program pemasangan alat perekam data transaksi online, juga mengetahui peran stuktur organisasi dalam menopang implementasi program pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di kabupaten Bandung

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif untuk memeriksa bagaimana Implementasi Kebijakan Program pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di kabupaten Bandung dan untuk mengeksplorasi bagaimana fungsi program dalam menghasilkan pendapatan. Pada tahap awal peneliti menelusuri mengenai topic yang tepat dan sembari meninjau literatur tentang topik tersebut dan terdapat suatu hal yang dapat dijadikan sebagai suatu penelitian. Segala sesuatu dapat dijadikan sebagai bahan penelitian baik itu positif ataupun negative sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh ulber silalahi (2017) berpendapat bahwa “ketidaksesuaian antara apa yang ada atau actual dan seharusnya ada atau diharapkan tidak hanya bersifat negative tetapi dapat juga dapat bersifat positif. Dalam penelitian kali ini, data sekunder mengacu pada informasi yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber data. Data sekunder dikumpulkan untuk penelitian ini melalui pemeriksaan dokumen, buku, surat kabar, kertas, dan arsip yang berkaitan dengan

kebijakan program pemasangan alat perekam transaksi online dalam meningkatkan pendapatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literature.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini adalah meliputi bagaimana pelaksanaan komunikasi dari program pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di kabupaten bandung. Kedua, apa saja sumberdaya pendukung dalam pelaksanaan program pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di kabupaten bandung. Ketiga, bagaimana upaya disposisi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan program dan keempat, bagaimana peran struktur organisasi dalam menopang program pemasangan alat perekam pada pajak hotel di kabupaten bandung.

Pelaksanaan program pemasangan alat perekam data transaksi online ini telah diimplementasikan sejak tahun 2018, dimana dalam program ini merupakan tanggungjawab dari bidang pengendalian dan perencanaan operasional (P2O), diharapkan dengan adanya program tersebut sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh bidang perencanaan dan pengendalian operasional (P2O) dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak khususnya sektor hotel guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah pajak hotel di Kabupaten Bandung.

Pada penelitian ini, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan implementasi dari program pemasangan alat perekam data transaksi online pada pajak hotel di Kabupaten Bandung tersebut, peneliti akan memaparkan beberapa hal berikut mengenai komunikasi dalam pelaksanaan program, sumberdaya dalam pelaksanaan program, upaya disposisi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan peran dari struktur birokrasi dalam menopang implementasi program tersebut.

#### 1. Komunikasi

Indikator komunikasi dari pemasangan alat perekam data transaksi online ini dapat dilihat dari transmisi dan kejelasan komunikasi dimana dalam komunikasi tersebut sebelum melaksanakan program harus ada aturan yang menaungi program tersebut dan tidak adanya missskomunikasi baik dalam melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga tidak terdistorsi di tengah jalan karena adanya petunjuk yang jelas dalam pelaksanaan dari program ini sehingga memudahkan tiap tingkatan dalam pelaksanaan program tersebut. Sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak indra selaku kasi pengendalian pengendalian dan perencanaan operasional. Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan program pemasangan alat perekam data transaksi online ini sudah sangat jelas karena landasan aturannya pun ada yaitu dalam perbup nomor 135 tahun 2020 dan petunjuk pelaksanaannya mudah dipahami dikarenakan dalam pelaksanaan program ini sudah kami buat buku panduannya juga sehingga dapat memudahkan dalam penggunaan alat tersebut oleh siapapun” ( Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023).

#### 2. Sumber Daya

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya adalah staff, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas. Dapat dikatakan bahwa semua sumber daya yang ada itu harus digunakan sebaik mungkin dan saling berkesinambungan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak indra selaku kasi pengendalian dan perencanaan operasional.

### 3. Disposisi

Sikap dari tim pelaksana telah mendukung sepenuhnya terhadap apa yang direncanakan sebelumnya dalam meningkatkan pendapatan daerah sektor pajak hotel, karena sikap dari pelaksana program tersebut memiliki sikap yang positif dan juga dibantu dengan adanya sistem insentif yang diberikan kepada pegawai yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga dapat mencapai target, namun sikap dari wajib pajak nya itu tersendiri masih terdapat kendala karena kurangnya kesadaran akan kewajibannya dalam membayar pajak terhadap pemerintah atas apa yang telah mereka dapatkan dan juga terdapat intervensi atau perlakuan khusus terhadap wajib pajak yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan yang seharusnya mereka taat justru malah sebaliknya.

### 4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan dapat menghambat jalannya pelaksanaan sebuah kebijakan. Maka berdasarkan hal tersebut, memahami struktur birokrasi itu merupakan faktor yang fundamental dalam dalam mengkaji implementasi kebijakan public.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya SOP mengenai pelaksanaan program pelaksanaan alat rekam data transaksi online ini telah dibuatkan sejak awal diterapkannya program ini pada tahun 2018 dan bisa saja terjadi perubahan dalam SOP tersebut dikarenakan kita harus terus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada seiring dengan berkembangnya zaman sebagai bentuk adaptif badan pendapatan daerah kabupaten bandung dan terkait fragmentasi dalam pelaksanaan program ini dapat dikatakan sudah ada karena memang dalam pelaksanaannya program ini memerlukan kerjasama dari beberapa pihak baik itu pihak ketiga ataupun instansi lainnya.

## D. SIMPULAN

Berdasarkan pada deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang didasarkan pada analisis dan temuan – temuan data dilapangan. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Impelemntasi Kebijakan Program Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Online pada pajak hotel di Kabupaten Bandung belum optimal secara menyeluruh apabila dilihat dari keempat dimensi yang dikemukakan oleh Edward III. Dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan cukup baik karena landasan dan kejelasan dalam penggunaan alat tersebut ada aturannya hanya saja masih terdapat perubahan dalam penyampaian informasi terkait penggunaan alat tersebut
2. Sumberdaya dalam pelaksanaan program pemasangan alat perekam data transaksi online baik itu sumber daya manusia atau sarana dan prasarana lainnya telah berkontribusi aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi masing masing
3. Sikap dari pelaksana program dapat dikatakan mendukung sepenuhnya terhadap program tersebut hanya saja yang menjadi penghambat dalam program ini yaitu sikap dari wajib pajak nya sendiri masih terdapat beberapa wajib pajak yang kurang sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak
4. Struktur birokrasi juga dalam pelaksanaan program ini dapat dikatakan sudah baik karena dalam pelaksanaan ini telah menggunakan SOP yang dibuatkan sebelumnya dan bersifat luwes adaptif apabila terdapat perubahan dalam pelaksanaannya dan adanya kerjasama yang baik dengan pihak ataupun instansi lainnya dalam penegakan program tersebut.

**REFERENSI**

- Alhusain, Achmad Sani. 2018. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Amtiran, P. Y. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. Amtiran and Molidya/ Journal Of Management (SME,s) , Vol. 12,No.2, 206-207.
- Bagui, Laban. Shallen Lusinga. Nthhabiseng Pule. Teofelus Tuyeni. Chimwemwe Q.Mtegha. Enrico Calandro. Wallace Chigona. Basie von Solms. (2023). Dampak COVID-19 pada peningkatan kesadaran dan pola pikir keamanan siber di komunitas pembangunan Afrika bagian selatan (SADC). WILEYONLINE LIBRARY.COM/JOURNAL/isd2.
- Creswell, J.W. 2015 . Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatimah, Dwi. (2020). Teknik Analisis SWOT Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif dan Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman. Yogyakarta: Cinta Pena, Djuroto.
- Grindle, Merilee S. (Ed). 19 80. Politics and Apolicy Implementation in the Third World, New Jersey: Princetown University Press.
- Halim, Abdul. 2013. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Maharani, Irma Sri. 2022. Efektivitas Program Tapping Box Di Bapenda Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pajak Restoran. Skripsi. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Nazarudin. 2018. Manajemen Strategik. Palembang: NoerFikri Offset.
- Nurhadi, Febrianti Dwi Cahya., Mardiyono., Rengu, Stefanus Pani, (2015), Strategi pengembangan pariwisata oleh pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 325-331
- Olarewaju Tolu, Ibrahim Rufai, dan Galeri Samanthika. (2020). E-transparansi dan korupsi anggaran pemerintah: Kasus pemasaran dan transformasi sosial dari Nigeria WILEYONLINE LIBRARY.COM/JOURNAL/isd2,
- Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Raihan, M. S. Sarumpaet, dan D. Sukmasari. 2021. Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 10 (1).
- Rahayu, Ani Sri. 2018. Pengantar Pemerintahan Daerah. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rangkuti, Freddy. 2017. Analisis SWOT teknik membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Rencana Strategis BAPENDA Kabupaten Bandung tahun 2016-2021
- Rulandari, A. S. (2020). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2019. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) , Vol.2, No. 1, 14-15.
- Sakti, Fajar Tri. 2018. Modul Akuntabilitas Publik. Bandung: Fisip UNPAS Press.
- Sakti, Fajar Tri. 2014. Sisi Gelap Perencanaan. Bandung: FISIP UNPAS PRESS.
- Silalahi, Ulbert. 2018. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Siwale, Kawula. dan Gwamaka Mwalemba. (2022). Pengaruh masyarakat pada pengambilan

ARTIKEL

---

keputusan karir: Perspektif wanita Afrika yang mengejar profesi terkait teknologi  
.WILEYONLINELIBRARY.COM/JOURNAL/isd2.

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suharjono, Muhammad. (2014), Pembentukan peraturan daerah yang responsif dalam mendukung otonomi daerah. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, Hal. 21 – 37

Suwanda, D. 2013. Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda. Jakarta: PPM.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah